

PENERAPAN ADAPTIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN BENCANA ALAM

(Studi Kasus: Respon Dinas Sosial P3A Provinsi Bali Terhadap Banjir
Di Kota Denpasar)

I Kadek Edra Dwi Wikannanda¹, I Dewa Ayu Putri Wirantari²

kadekedrawikannanda@gmail.com¹, putriwirantari@unud.ac.id²

Universitas Udayana

ABSTRAK

Penanganan banjir di Kota Denpasar memerlukan tata kelola yang responsif dan adaptif terhadap dinamika risiko bencana perkotaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Agile Adaptive Governance dalam respons penanganan banjir melalui enam indikator utama, yaitu good enough governance, business-driven, human-focused, quick wins, systematic and adaptive approach, serta simple design and continuous refinement. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara dengan pejabat struktural terkait, dan telaah dokumentasi penanganan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons sosial yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali berjalan relatif cepat, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan. Namun demikian, penguatan integrasi data, dokumentasi evaluatif, dan pelembagaan pembelajaran pascabencana masih diperlukan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian adaptive governance dalam konteks bencana perkotaan serta memberikan implikasi praktis bagi peningkatan kapasitas tata kelola pemerintah daerah.

Kata Kunci: Tata Kelola Adaptif, Agile Adaptive Governance, Penanganan Banjir, Bencana Perkotaan, Respon Sosial Pemerintah.

ABSTRACT

Flood management in Denpasar City requires governance mechanisms that are responsive and adaptive to the dynamics of urban disaster risk. This study aims to analyze the application of Agile Adaptive Governance in flood response through six key indicators: good enough governance, business-driven, human-focused, quick wins, systematic and adaptive approach, and simple design and continuous refinement. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing field observations, interviews with relevant structural officials, and a review of disaster management documents. The findings indicate that the social response coordinated by the Social Affairs, Women's Empowerment, and Child Protection Office (P3A) of Bali Province was relatively swift, flexible, and oriented toward the needs of affected communities, particularly vulnerable groups. Nevertheless, stronger data integration, evaluative documentation, and the institutionalization of post-disaster learning remain necessary. This study contributes to the development of adaptive governance scholarship in the context of urban disasters and offers practical implications for strengthening local government governance capacity.

Keywords: Agile Adaptive Governance, Adaptive Governance, Flood Management, Urban Disaster, Government Social Response.

PENDAHULUAN

Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Provinsi Bali menghadapi peningkatan risiko banjir yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, perubahan tata guna lahan, dan meningkatnya intensitas curah hujan. Urbanisasi yang pesat telah mendorong perluasan kawasan terbangun dan berkurangnya ruang terbuka hijau, sehingga menurunkan kapasitas lingkungan dalam menyerap limpasan air. Kondisi tersebut menjadikan banjir sebagai salah satu bencana perkotaan yang kerap menimbulkan

dampak signifikan terhadap aktivitas sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Banjir tidak hanya mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan kerentanan kelompok masyarakat tertentu, terutama kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya.

Risiko banjir di wilayah perkotaan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor fisik, seperti topografi, sistem drainase, dan curah hujan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas tata kelola pemerintah dalam merespons situasi darurat. Pendekatan birokrasi konvensional yang bersifat hierarkis dan prosedural sering kali menghadapi keterbatasan dalam kondisi krisis yang menuntut kecepatan, fleksibilitas, dan koordinasi lintas sektor. Dalam konteks bencana, keterlambatan pengambilan keputusan atau ketergantungan pada prosedur formal yang kaku dapat memperbesar dampak sosial yang dialami masyarakat terdampak.

Penanganan bencana banjir tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan fisik, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang membutuhkan respons cepat dan tepat sasaran. Respons sosial pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, seperti pangan, perlindungan kelompok rentan, dan dukungan pemulihan awal. Dalam banyak kasus bencana perkotaan, efektivitas respons sosial sangat bergantung pada kemampuan institusi pemerintah untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan yang dinamis serta menjalin kolaborasi dengan berbagai aktor, termasuk perangkat lokal dan relawan.

Dalam konteks tersebut, pendekatan Agile Adaptive Governance menawarkan perspektif yang relevan untuk memahami bagaimana pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan dan praktik tata kelola dalam situasi ketidakpastian. Pendekatan ini menekankan kelincahan pengambilan keputusan, fleksibilitas kebijakan, serta pembelajaran berkelanjutan sebagai respons terhadap perubahan risiko dan kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan model tata kelola yang menekankan stabilitas dan kepatuhan prosedural, Agile Adaptive Governance memandang adaptasi dan improvisasi sebagai bagian penting dari efektivitas kebijakan dalam situasi krisis.

Sejumlah studi sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan tata kelola adaptif dalam penanganan bencana dapat meningkatkan efektivitas respons dan memperkuat ketahanan wilayah perkotaan. Namun, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek teknis penanggulangan bencana atau manajemen kebencanaan secara umum, sementara analisis terhadap respons sosial pemerintah daerah, khususnya dari perspektif dinas sosial, masih relatif terbatas. Selain itu, penerapan kerangka Agile Adaptive Governance dalam konteks penanganan banjir perkotaan di Indonesia belum banyak dikaji secara empiris.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini berfokus pada peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali sebagai bagian dari aktor pemerintah daerah yang terlibat dalam respons sosial pascabencana banjir di Kota Denpasar. Berangkat dari pengalaman empiris peneliti yang terlibat langsung dalam kegiatan penyaluran bantuan sosial, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip Agile Adaptive Governance dalam penanganan banjir serta mengidentifikasi tantangan dan peluang penguatan tata kelola adaptif di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan tata kelola bencana perkotaan yang lebih responsif dan berkelanjutan'.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agile Adaptive Governance

Konsep Agile Adaptive Governance merupakan pendekatan tata kelola yang mengintegrasikan prinsip kelincahan (agility) dan kemampuan adaptasi institusi dalam

merespons perubahan lingkungan yang dinamis. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang cepat, fleksibilitas kebijakan, pembelajaran berkelanjutan, serta kolaborasi lintas aktor dalam menghadapi situasi krisis dan ketidakpastian. Dalam konteks penanganan bencana, Agile Adaptive Governance dipahami sebagai kerangka analitis yang memungkinkan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat secara efektif meskipun berada dalam keterbatasan waktu, data, dan sumber daya. Enam indikator utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *good enough governance*, *business-driven*, *human-focused*, *quick wins*, *systematic and adaptive approach*, serta *simple design and continuous refinement*, digunakan untuk menganalisis praktik respons sosial pemerintah dalam penanganan banjir di Kota Denpasar

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi tata kelola adaptif dalam penanganan banjir di Kota Denpasar. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan pejabat struktural Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali, serta telaah dokumentasi kebijakan dan laporan kegiatan penanganan banjir.

Peneliti terlibat secara langsung sebagai *observer-participant* dalam kegiatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak banjir pada 15 September 2025. Untuk meminimalkan potensi bias, data dianalisis melalui triangulasi sumber dan teknik. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola penerapan prinsip Agile Adaptive Governance dalam respons sosial pemerintah terhadap bencana banjir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan banjir di Kota Denpasar pasca peristiwa 10 September 2025 mencerminkan praktik tata kelola yang responsif dan adaptif, khususnya pada aspek respons sosial yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali. Temuan empiris yang diperoleh melalui observasi lapangan, keterlibatan langsung dalam distribusi bantuan, serta wawancara dengan pejabat struktural menunjukkan bahwa proses penanganan banjir tidak sepenuhnya mengikuti pola birokrasi konvensional, melainkan mengedepankan fleksibilitas, kecepatan, dan orientasi pada kebutuhan masyarakat. Pola tersebut selaras dengan kerangka Agile Adaptive Governance yang menekankan kelincahan institusional dan kemampuan beradaptasi dalam situasi krisis.

Good Enough Governance

Penerapan prinsip *good enough governance* tercermin dari pola koordinasi awal yang dilakukan secara cepat dan pragmatis. Dinas Sosial P3A Provinsi Bali tidak menunggu laporan administratif formal, melainkan langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial kabupaten/kota serta perangkat desa dan kelurahan setempat. Keterlibatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagai aktor lapangan memperkuat efektivitas respons awal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tata kelola yang diterapkan berfokus pada keberfungsian sistem dalam kondisi darurat, bukan pada kesempurnaan prosedural. Dalam konteks bencana, praktik ini menjadi relevan karena memungkinkan pengambilan keputusan yang memadai untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat meskipun dengan keterbatasan data awal.

Business-Driven

Prinsip business-driven tercermin dalam pengambilan keputusan operasional yang didasarkan pada efisiensi dan kesiapan sumber daya. Pengambilan bantuan sembako dari Klungkung dilakukan karena Yayasan Relawan Bali memiliki pusat paket bantuan yang siap didistribusikan di wilayah tersebut, bukan karena keterbatasan stok di Denpasar. Selain itu, keberadaan buffer stock bencana di masing-masing kabupaten/kota menunjukkan adanya perencanaan logistik yang memungkinkan respons cepat. Temuan ini memperlihatkan bahwa keputusan penanganan banjir diambil secara pragmatis berdasarkan kebutuhan dan kondisi lapangan, bukan semata-mata pertimbangan administratif.

Human Focused

Pendekatan human-focused tampak jelas dalam mekanisme penentuan penerima bantuan yang didasarkan pada asesmen langsung dan laporan pendamping lapangan. Pemerintah menyesuaikan distribusi bantuan dengan tingkat dampak dan kerentanan masyarakat, termasuk memprioritaskan bantuan bayi serta perhatian terhadap warga yang kehilangan tempat tinggal atau mata pencarian pascabencana. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan darurat jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan sosial dan keberlanjutan pemulihan masyarakat.

Based on Quick Wins

Distribusi 200 paket sembako pada 15 September 2025, atau lima hari setelah kejadian banjir, mencerminkan penerapan prinsip quick wins. Kecepatan respons ini dimungkinkan oleh kesiapan logistik internal dan dukungan jejaring relawan. Tindakan cepat tersebut memberikan dampak langsung bagi masyarakat terdampak, baik secara material maupun psikologis, karena mampu mengurangi ketidakpastian dan tekanan sosial pascabencana. Dalam kerangka Agile Adaptive Governance, quick wins berfungsi sebagai langkah awal yang penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus membuka ruang bagi intervensi lanjutan yang lebih sistematis.

Systematic and Adaptive Approach

Meskipun evaluasi pascabencana belum sepenuhnya terdokumentasi secara formal, terdapat indikasi kuat adanya proses adaptasi kebijakan dalam penanganan banjir. Penyesuaian lokasi dan mekanisme distribusi bantuan dilakukan berdasarkan tingkat dampak, aksesibilitas wilayah, serta laporan masyarakat dan pendamping lapangan. Selain itu, fokus penanganan pascabencana bergeser dari respons darurat menuju pemulihan jangka menengah dan panjang, khususnya bagi warga yang kehilangan tempat tinggal atau mata pencarian. Temuan ini menunjukkan bahwa adaptasi kebijakan berlangsung secara praktis melalui pembelajaran dari pengalaman lapangan, meskipun belum dilembagakan secara administratif.

Simple Design and Continuous Refinement

Prinsip simple design and continuous refinement tercermin dari penyederhanaan prosedur penyaluran bantuan agar mudah dijalankan oleh berbagai aktor, termasuk relawan dan pendamping sosial. Alur koordinasi dan distribusi bantuan dirancang tidak berbelit-belit sehingga memungkinkan respons yang cepat dan efisien. Seiring berjalannya proses penanganan, dilakukan penyesuaian terhadap rute distribusi dan metode pembagian bantuan berdasarkan kendala dan kebutuhan yang muncul di lapangan. Praktik ini menunjukkan bahwa tata kelola adaptif bersifat dinamis dan terus disempurnakan melalui pengalaman empiris.

Analisis menunjukkan bahwa implementasi penanganan banjir pasca 10 September 2025 secara umum selaras dengan prinsip Agile Adaptive Governance, khususnya Human-

Focused dan Quick Wins. Distribusi bantuan pada 15 September 2025 mencerminkan respons cepat dan relevan terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Meskipun demikian, prinsip Systematic and Adaptive Approach serta Continuous Refinement belum optimal karena dokumentasi evaluatif dan integrasi data antarinstansi masih terbatas. Namun improvisasi yang terjadi pada proses pendistribusian bantuan memperlihatkan kapasitas adaptif yang kuat. Temuan ini menegaskan bahwa tata kelola adaptif tidak hanya dibangun melalui kerangka kebijakan formal, tetapi juga melalui kemampuan institusional untuk menyesuaikan tindakan berdasarkan dinamika risiko dan kondisi lapangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan banjir di Kota Denpasar mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Agile Adaptive Governance dalam respons sosial pemerintah daerah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali berperan penting dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan, melalui respons yang relatif cepat dan fleksibel. Implementasi indikator good enough governance, business-driven, human-focused, dan quick wins tampak dominan dalam praktik lapangan, terutama pada fase respons darurat pascabencana, sehingga memungkinkan pemerintah merespons kondisi krisis secara efektif meskipun berada dalam keterbatasan sumber daya dan informasi.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa penerapan indikator systematic and adaptive approach serta simple design and continuous refinement masih bersifat praktis dan belum sepenuhnya terlembagakan secara administratif. Proses evaluasi dan pembelajaran pascabencana cenderung dilakukan secara informal, sehingga adaptasi kebijakan sangat bergantung pada pengalaman individu dan jejaring kerja yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola adaptif di tingkat daerah masih menghadapi tantangan dalam hal integrasi data, dokumentasi evaluatif, serta konsistensi mekanisme pembelajaran lintas kejadian bencana.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian adaptive governance dalam konteks bencana perkotaan di Indonesia, khususnya dari perspektif respons sosial pemerintah daerah. Temuan penelitian menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelembagaan proses evaluasi, peningkatan integrasi data, dan pengembangan sistem pembelajaran berkelanjutan agar penerapan Agile Adaptive Governance tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas penanganan bencana banjir di wilayah perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, N. &. (2020). Analisis kerentanan banjir di wilayah perkotaan: Studi kasus Kota Semarang. *Jurnal Geografi*, 102-112.
- Astuti, R. D. (2021). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 33-45.
- Hafid, A. (2021). Peran pemerintah daerah dalam penanganan banjir perkotaan: Studi pada Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 55-67.
- Ismail, M. &. (2020). Koordinasi antarinstansi dalam penanggulangan bencana banjir di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 119-131.
- Prasetyo, D. &. (2020). Efektivitas kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir di daerah perkotaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 75-88.
- Sari, N. P. (2021). Analisis respons cepat pemerintah daerah terhadap bencana banjir. *Jurnal Administrasi Negara*, 45-60.

Wibowo, A. (2022). pendekatan adaptif dalam pengurangan risiko bencana: Studi kasus wilayah perkotaan di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 237-254.